

Membangun Karakter Demokratis Melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah

¹Ade Fadly Anugrah, ²Feronica Manurung, ³Habibi Habibi, ⁴Novita Rahayu,
⁵Ruth Clarissa Tambunan, ⁶Hamdi Abdullah Hasibuan

¹⁻⁶Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Riau, Indonesia

Email : ¹ade.fadly4174@student.unri.ac.id, ²feronica.manurung5918@student.unri.ac.id,
³habibi5913@student.unri.ac.id, ⁴novita.rahayu5916@student.unri.ac.id,
⁵ruth.clarissa5796@student.unri.ac.id, ⁶hamdi.abdullah@lecture.unri.ac.id

Alamat : Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau

Korespondensi penulis : ade.fadly4174@student.unri.ac.id

Abstract. Pancasila and Citizenship Education (PPKn) has a strategic role in building democratic character among the younger generation as an important capital in the life of society, nation and state. This research aims to analyze how the implementation of PPKn education in schools can be an effective means of internalizing democratic values, such as tolerance, justice, respect for human rights, and deliberation. Civics learning requires good preparation, especially through preparing material that not only provides knowledge but is also able to bring about changes in the character of students. This research uses a qualitative approach with a literature review method, which includes critical analysis of various sources, such as national and international journal articles, books, e-books, dissertations, theses, as well as print and online media which can provide a comprehensive picture of the role of PPKn in form students' democratic character. The research results show that PPKn education based on Pancasila values has proven to be effective in developing individuals who have strong character and are able to face the challenges of the era of globalization. By combining the values of Pancasila and democratic principles, this education plays a role in forming a highly civilized, competitive and globally superior nation.

Keywords: Pancasila, education, citizenship

Abstrak. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam membangun karakter demokratis di kalangan generasi muda sebagai modal penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi pendidikan PPKn di sekolah dapat menjadi sarana efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi, seperti toleransi, keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan musyawarah. Pembelajaran PPKn memerlukan persiapan yang baik, terutama melalui penyusunan materi yang tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga mampu membawa perubahan karakter peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur, yang mencakup analisis kritis terhadap berbagai sumber, seperti artikel jurnal nasional maupun internasional, buku, e-book, disertasi, tesis, serta media cetak dan online yang dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran PPKn dalam membentuk karakter demokratis siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan PPKn yang berbasis nilai Pancasila terbukti efektif dalam membangun individu yang memiliki karakter kuat dan mampu menghadapi tantangan era globalisasi. Dengan memadukan nilai-nilai Pancasila dan prinsip demokrasi, pendidikan ini berperan dalam membentuk bangsa yang berperadaban tinggi, kompetitif, dan unggul secara global.

Kata kunci: Pendidikan, Pancasila, Kewarganegaraan.

1. PENDAHULUAN

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara serta pandangan hidup yang harus menjadi landasan dalam setiap aspek pembangunan (Oktoriza, 2023). Dalam konteks demokrasi, nilai-nilai demokrasi Indonesia diwujudkan melalui implementasi sila-sila Pancasila (Kurniawan et al., 2022). Selain itu, Undang-Undang RI

Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya yang direncanakan secara sadar untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik dalam hal keagamaan, kepribadian, dan pengendalian diri dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 2 menambahkan bahwa adanya pendidikan nasional bertujuan untuk membangun karakter dan mencerdaskan kehidupan bangsa agar menghasilkan individu yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, berpengetahuan, serta mampu menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Namun, pada masa kini, nilai-nilai demokrasi sedang mengalami penurunan. Masyarakat Indonesia, yang dulu terkenal dengan sikap yang santun, mendahulukan musyawarah dan mufakat, serta menghargai toleransi dan gotong-royong, kini cenderung terpecah menjadi kelompok-kelompok homogen yang bersaing dan saling merugikan. Maka, pendidikan karakter menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah demi mencetak generasi penerus yang berbudi pekerti luhur dan terpuji.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam pengembangan karakter dan peningkatan kesadaran nasional di kalangan generasi muda di Indonesia. Sebagai prinsip dasar bangsa, Pancasila tidak semata-mata terintegrasi ke dalam kurikulum pendidikan formal, tetapi juga berfungsi sebagai kompas moral dalam keberadaan sehari-hari. Melalui pembelajaran PPKn, kaum muda didorong untuk mengakui nilai-nilai fundamental seperti kolaborasi, kesetaraan, solidaritas, dan prinsip-prinsip demokrasi, yang merupakan komponen integral dari identitas nasional. Namun demikian, dalam konteks globalisasi yang terus-menerus dan proliferasi informasi, segudang tantangan baru muncul dalam upaya untuk menegakkan dan mewujudkan nilai-nilai ini. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh tentang pentingnya pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam pengembangan karakter yang tangguh dan rasa nasionalisme yang teguh sangat penting dalam upaya membina masa depan yang lebih menjanjikan dan berkelanjutan bagi bangsa.

Pancasila, sebagai ideologi nasional, berfungsi sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia sekaligus mencerminkan karakter bangsa yang ingin dibangun. Karakter suatu bangsa bukanlah sesuatu yang langsung terbentuk, melainkan hasil dari proses pembudayaan melalui pendidikan. Sebagai panduan hidup, Pancasila menjadi dasar dan jiwa dalam semua aspek penyelenggaraan negara yang menjadi pedoman bagi warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertindak sehari-hari.

Pancasila memberikan arahan yang tegas dalam menilai kesesuaian sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bersama, baik dalam konteks sosial, kebangsaan, maupun kebernegaraan. Dalam lingkup pendidikan, penyampaian nilai-nilai Pancasila meliputi lebih dari sekadar materi pembelajaran, namun juga mencakup pengembangan sikap dan kepribadian yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Sayangnya, banyak yang hanya mengetahui prinsip-prinsip dasar Pancasila tanpa mengamalkan esensinya. Diharapkan, melalui pelajaran PPKn dan pembentukan kebiasaan baik oleh guru, siswa mampu menginternalisasi makna dari nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan pribadi dan lingkungan sekitar.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana karakter demokrasi bisa terbentuk melalui proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Kegiatan penelitian literatur melibatkan proses pengumpulan data dari berbagai sumber perpustakaan, membaca, mencatat, dan menganalisis informasi yang relevan dengan cermat. Metode ini bergantung pada bahan pustaka sebagai sumber data utamanya (Mustika Zed, 2004).

Sumber referensi yang digunakan meliputi bahan primer serta sekunder, seperti jurnal, buku, artikel nasional dan internasional, *e-book*, disertasi, tesis, media daring, majalah, serta berbagai jenis sumber lainnya. Pengumpulan literatur dilakukan dengan memanfaatkan berbagai platform ilmiah seperti *Google Scholar*, Portal Garuda, Perpustnas, *ResearchGate*, dan sumber akademik lainnya. Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk memperkuat analisis terkait permasalahan yang diangkat sekaligus menjadi dasar dalam menyusun argumen mengenai hubungan antara PPKn dan pembentukan karakter demokratis (Rahmatiani, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan termasuk ke dalam kurikulum sekolah yang menjadi salah satu mata pelajaran wajib yang diajarkan. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter peserta didik berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sehingga mereka dapat tumbuh dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dengan optimal dalam kehidupan sehari-hari (Asril et al., 2023).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (*Civic Education*) memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan beradab. Zubaidi, dalam buku *Pendidikan Pancasila* (2010), menyatakan bahwa sesuai keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, mata pelajaran dan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dirancang untuk mendorong pengembangan kepribadian peserta didik. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan mengadopsi paradigma baru yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Pendidikan ini merupakan gabungan dari *Civic Education*, *Democracy Education*, dan *Citizenship Education*, dengan Filsafat Pancasila sebagai dasar utamanya. Dalam perjalanannya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terus mengalami perubahan untuk menyempurnakan isi dan tujuannya. Awalnya, Pendidikan Kewarganegaraan dikenal sebagai Pendidikan Kewiraan, yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 1973/1974, sebelum akhirnya berkembang menjadi Pendidikan Pancasila seperti yang dikenal saat ini (Asril et al., 2023).

Selain itu, PKN memiliki kaitan erat dengan kurikulum Pendidikan Pancasila (PP) dan Pendidikan Moral Pancasila (PMP), dan berbagai cabang pendidikan lainnya. Maka dari itu, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi dua elemen utama yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan (Asril et al., 2023).

Pendidikan Demokrasi

Pendidikan Pancasila memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan pemahaman tentang seberapa pentingnya demokrasi bagi warga negara. Nilai-nilai yang terdapat di dalamnya sangat terang benderang dan relevan, seperti nilai persatuan, demokrasi, dan keadilan untuk mencapai tujuan terciptanya sistem demokrasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui nilai-nilai tersebut, karakter seseorang akan terbentuk dengan pemahaman yang mendalam akan pentingnya demokrasi dalam kehidupan negara. (Yuniarto, 2018). Untuk mewujudkan suatu demokrasi yang baik dan benar pendidikanlah yang berperan penting pada pengenalan awal manusia untuk langsung mengenal dan nantinya akan terjun langsung terlibat dalam suatu demokrasi yang aktual untuk dapat mewujudkan demokrasi yang ideal dan bertatanegara (sunarso, 2016). Dalam tahap mengenal arti penting demokrasi siswa di ajarkan dengan hal-hal sederhana pada kehidupan sekolah seperti mengambil keputusan bersama, bermain bersama ataupun belajar bersama, ia ajarkan melalui pendidikan dan yang menjadi poros pentingnya ialah pendidikan pancasila.

Menurut (Sukarno, 2015), pendidikan demokrasi adalah sebuah proses pembelajaran yang membutuhkan waktu panjang agar dapat memastikan demokrasi dapat bertahan. Keberhasilan suatu pendidikan demokrasi sangat bergantung pada efektivitas dari transformasi nilai-nilai demokrasi yang ada di masyarakat.

Winataputra dan Budimansyah telah menjelaskan bahwa pendidikan demokrasi adalah suatu usaha yang dilakukan secara teratur untuk membantu warga negara dalam memahami, menjadikan sebagai bagian dari diri sendiri, serta mengembangkan pemahaman terkait konsep, prinsip, dan nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan peran mereka dalam kehidupan bersosial. Pendidikan demokrasi memiliki sejumlah tugas, yaitu:

1. Memfasilitasi warga negara untuk mengakses berbagai informasi mengenai demokrasi.
2. Menyediakan ruang konseptual dan kajian konseptual terkait demokrasi.
3. Membantu warga negara dalam memanfaatkan peluang secara cerdas dan bertanggung jawab.

Keterampilan warga negara dalam demokrasi dapat terlihat dari pemahaman mereka tentang pilar-pilar demokrasi. Sanusi, sebagaimana dikutip oleh (Rahmatiani, 2020), mengidentifikasi sepuluh jenis demokrasi, yaitu:

1. Demokrasi yang berlandaskan pada asas yang ber- Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Demokrasi yang didasarkan pada kecerdasan.
3. Demokrasi yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai inti.
4. Demokrasi yang berpijak pada “Aturan Hukum” (*Rule of Law*).
5. Demokrasi yang berdasarkan pembagian kekuasaan.
6. Demokrasi yang menghormati hak asasi manusia.
7. Demokrasi yang menjamin independensi pengadilan.
8. Demokrasi yang mendukung otonomi daerah.
9. Demokrasi yang berorientasi pada kemakmuran.
10. Demokrasi yang berlandaskan norma-norma sosial (Rahmatiani, 2020).

Urgensi Pembentukan karakter bangsa

Ellen G. White dalam (Hidayatullah, 2011) mengungkapkan bahwa pembentukan karakter merupakan salah satu tanggung jawab paling penting yang diamanahkan kepada manusia. Selain itu, pembangunan karakter juga dianggap sebagai tujuan utama dalam sistem pendidikan yang ideal. Oleh karena itu, hubungan antara pendidikan dan pengembangan karakter bangsa tidak dapat dipisahkan dari perumusan fungsi serta tujuan pendidikan nasional (Arif, 2014).

Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional memberikan penjelasan bahwa tujuan utama dari pendidikan nasional adalah untuk membentuk karakter yang mulia dan bermartabat serta menciptakan kehidupan yang lebih cerdas bagi bangsa kita. Tujuan utama dari pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi terbaik dari setiap individu agar mereka menjadi insan yang penuh iman, memiliki akhlak yang baik, sehat, cerdas, kreatif, dan dapat berdiri sendiri, juga menjadi anggota masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab (Rahmatiani, 2017).

Pusat Kurikulum Nasional Penelitian dan Pengembangan (2010) telah mengidentifikasi 18 nilai karakter dalam pendidikan karakter, yaitu:

1. **Religius:** Memiliki sikap dan perilaku yang patuh terhadap ajaran agama yang dianut, toleran terhadap agama lain, serta hidup rukun.
2. **Kejujuran:** Bersikap dan bertindak secara jujur sehingga dapat dipercaya.
3. **Toleransi:** Menghormati perbedaan dalam suku, pendapat, dan tindakan orang lain.
4. **Disiplin:** Mematuhi aturan serta menjalankan tugas dengan tertib.
5. **Kerja keras:** Menunjukkan usaha sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas.
6. **Kreativitas:** Berpikir inovatif untuk menciptakan sesuatu yang baru.
7. **Kemandirian:** Tidak bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas.
8. **Demokratis:** Menghormati hak dan kewajiban diri sendiri serta orang lain secara setara.
9. **Rasa ingin tahu:** Memiliki dorongan untuk memahami sesuatu lebih mendalam.
10. **Semangat kebangsaan:** Menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
11. **Cinta tanah air:** Memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara.
12. **Menghargai prestasi:** Mengapresiasi hasil karya diri sendiri maupun orang lain.
13. **Ramah/komunikatif:** Membangun hubungan yang baik dengan orang lain.
14. **Ramah/komunikatif:** Membangun hubungan yang baik dengan orang lain.
15. **Gemar membaca:** Membiasakan diri untuk membaca literatur yang bermanfaat.
16. **Peduli lingkungan:** Berusaha mencegah dan memperbaiki kerusakan lingkungan.
17. **Peduli sosial:** Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan.
18. **Tanggung jawab:** Menjalankan tugas dan kewajiban terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan.

Masyarakat Indonesia yang kuat ditandai oleh karakter religius, moderat, cerdas, dan mandiri. **Sifat religius** tercermin dalam ketaatan beribadah, kejujuran, kepedulian, serta toleransi. **Sifat moderat** terlihat dari sikap non-radikal, seimbang antara material dan spiritual, serta mampu bekerja sama dalam keragaman. **Kecerdasan** diwujudkan melalui

sikap rasional, cinta ilmu, berpikiran maju, dan keterbukaan. **Kemandirian** ditandai oleh disiplin, kerja keras, hemat, dan rasa cinta terhadap bangsa (Juliardi, 2016).

Hubungan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Pembentukan Karakter demokratis

Dalam konteks pendidikan, sistem politik memiliki perhatian pada bagaimana kebijakan pendidikan mempertahankan nilai-nilai politik sekaligus memberi ruang bagi warga negara untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan (Samsuri, 2010). Pada masa Orde Baru, pendidikan digunakan sebagai alat pembentukan karakter nasional yang berfokus pada standarisasi karakter bangsa. Proses ini terlihat pada mata pelajaran seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan PPKn, yang menyajikan Pancasila melalui interpretasi model P4. Kebajikan sipil dalam konteks ini diartikan sebagai tiga puluh enam butir praktik Pancasila yang dijadikan pedoman perilaku. Model P4 memberikan panduan berupa "harus" atau "sebaiknya" bagi warga negara.

Namun, perhatian terhadap pendidikan kewarganegaraan pada masa Orde Baru juga memicu seruan untuk reformasi. Dalam proses reformasi, muncul paradigma baru pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada pendidikan demokrasi (Winataputra, 2012). Paradigma ini menawarkan peluang untuk menyelaraskan pendidikan kewarganegaraan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang telah diterapkan di banyak negara. Cita-cita ini semakin diperkuat oleh suasana reformasi yang mendorong kritik dan partisipasi aktif dari warga negara.

Menurut (Mustari, 2014), nilai-nilai demokrasi dan indikator pengembangannya di sekolah dasar dapat diwujudkan melalui pembiasaan seperti berdiskusi dengan teman sebaya, menerima hasil pemilihan ketua OSIS dengan lapang dada, mengekspresikan pendapat terhadap teman yang menjadi pemimpin, memberikan kesempatan kepada pemimpin kelompok untuk bekerja, serta menjalankan kegiatan yang direncanakan oleh ketua kelompok.

Indikator keberhasilan pendidikan karakter demokratis di kelas, sebagaimana dijelaskan oleh Wibowo (2012), meliputi:

1. Menghormati pendapat orang lain tanpa paksaan,
2. Melaksanakan pemilihan wakil kelas secara demokratis,
3. Mengambil keputusan melalui musyawarah untuk mufakat, dan
4. Mengadopsi model pembelajaran yang dialogis dan interaktif (Kurniawan et al., 2022).

Implementasi Pembelajaran PPKn di sekolah Sebagai Upaya Penguatan Karakter Demokratis

Sekolah menjadi wadah penting dalam membangun karakter karena mendidik anak-anak dari berbagai latar belakang. Penguatan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila di sekolah merupakan upaya untuk membentuk akhlak mulia peserta didik sebagai generasi penerus bangsa, dengan berlandaskan ajaran moral yang sesuai dengan Pancasila. Penerapan pendidikan Pancasila melalui asas-asasnya dapat dilakukan pada berbagai mata pelajaran, seperti agama, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta pelajaran lainnya, dengan menanamkan kelima sila Pancasila dan praktiknya dalam kehidupan sekolah.

Nilai pertama dalam Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa", dapat membantu peserta didik dalam memperluas rasa toleransi terhadap perbedaan kepercayaan, yang mana merupakan aspek penting dalam pembentukan karakter seseorang melalui pendidikan karakter. Perintah kedua, yang dikenal dengan "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," memiliki tujuan untuk mendorong terciptanya sikap adil dan beradab melalui ragam kegiatan, baik yang bersifat pendidikan maupun non-pendidikan. Dalam sila ketiga, yang menyatakan "Persatuan Indonesia", siswa diberdayakan untuk mengembangkan semangat gotong-royong melalui partisipasi dalam tugas kelompok, kegiatan organisasi, dan ekstrakurikuler. Prinsip keempat yang berbunyi "Demokrasi yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan," dapat diwujudkan dengan melibatkan mahasiswa dalam berbagai organisasi, seperti OSIS. Di dalam organisasi tersebut, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan musyawarah yang bermanfaat bagi perkembangan diri mereka. Prinsip kelima, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia," mengajarkan siswa untuk bersikap adil terhadap semua orang, termasuk terhadap sesama, menjadi pemimpin kelas dengan cara memimpin dengan bijaksana dan berakhlak yang baik.

Penguatan nilai-nilai demokrasi di sekolah memberikan dampak positif. Penelitian menunjukkan bahwa internalisasi Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara di sekolah meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai demokrasi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Karakter demokratis tidak hanya mencakup kebebasan berpendapat dan partisipasi aktif, tetapi juga pemahaman mendalam tentang hak dan tanggung jawab. Program internalisasi Pancasila di sekolah bertujuan untuk memberdayakan siswa agar karakter demokratisnya menjadi bagian dari kebiasaan yang diterapkan di luar lingkungan sekolah.

Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, sistem pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertanggung jawab. Dengan dasar tersebut, program ini menjadi sarana untuk menguatkan keterampilan siswa, menjadikan mereka individu yang berakarakter dan berakhlak mulia. Penanaman nilai demokrasi di sekolah sangat penting dalam mempersiapkan siswa menghadapi tantangan globalisasi, yang membawa arus budaya dan peradaban lintas negara dengan cepat. Hal ini menuntut sistem pendidikan menghasilkan individu berkualitas tinggi dan profesional, yang mampu menghadapi dinamika global dengan prinsip demokratis dan karakter yang kuat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pentingnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam membangun karakter demokratis di kalangan siswa. Melalui pengajaran nilai-nilai Pancasila, siswa dilatih untuk menghargai pandangan orang lain, berpartisipasi dalam proses demokrasi seperti pemilihan, dan mengambil keputusan melalui musyawarah. Penerapan nilai-nilai ini di lingkungan sekolah tidak hanya membantu siswa memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, tetapi juga membekali mereka untuk menghadapi tantangan global dengan karakter yang kuat serta berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, pendidikan karakter yang berakar pada nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting dalam sistem pendidikan saat ini. Untuk tercapainya pendidikan di Indonesia agar dapat mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademis tetapi juga memiliki karakter kuat serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, artikel ini memiliki beberapa saran yaitu diantaranya, yang pertama dapat melalui pengembangan kurikulum PPKn yang terus diperbaharui agar lebih menekankan praktik demokrasi serta melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan seperti OSIS dan forum diskusi. Yang kedua ialah guru yang masih perlu melakukan pelatihan tentang metode pelajaran yang interaktif dan dialogis untuk mendukung pengajaran nilai-nilai demokrasi dengan lebih efektif. Selanjutnya yang ketiga yaitu diperlukannya peran orang tua serta masyarakat dalam pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan karakter demokratis di luar sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu perlu dilakukannya evaluasi rutin terhadap pelaksanaan pembelajaran PPKn guna memastikan nilai-nilai demokrasi dapat diimplementasikan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR REFERENSI

Adolph, R. (2016). Pendidikan kewarganegaraan dan pembentukan karakter demokratis warga negara. 1–23.

Arif, D. B. (2014). Pendidikan kewarganegaraan dan pembentukan karakter demokratis warga negara. In *Prosiding Seminar Nasional*.

Asril, J., Syahrizal, A., Armalena, & Yuherman. (2023). Peningkatan nilai-nilai demokrasi dan nasionalisme pada mahasiswa melalui pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1300–1309. Diambil dari <https://jim.usk.ac.id/sejarah>

Hidayatullah, M. F. (2011). Pendidikan karakter dan pengembangan metode pembelajaran nilai. Bahan tayangan disampaikan dalam Pentatoka Doswar se-Jawa Tengah dan DIY di Dodik Bela Negara Resimen Kodam IV/Diponegoro Magelang, 12 April 2011.

Juliardi, B. (2015). Implementasi pendidikan karakter melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 2(2), 3.

Kurniawan, B. P., Nuswantari, N., & ... (2022). Pengaruh sekolah dalam membangun karakter demokratis siswa kelas XI SMAN 1 Karangjati tahun ajaran 2021-2022 Kabupaten Ngawi. *Seminar Nasional*, 10, 379–389. Diambil dari <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SENASSDRA/article/view/2722>

Mustari, M. (2014). *Nilai karakter: Refleksi untuk pendidikan*. Grafindo Persada.

Oktoriza, A. (2023). *Jurnal global citizen*, 1.

Pusat Kurikulum Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa*. Pusat Kurikulum, Balitbang, Kementerian Pendidikan Nasional.

Rahmatiani, L. (2017). Pembentukan karakter siswa melalui program Lisa, Libra, Patujar di SMPN 1 Cilamaya Wetan. *CIVICS*, 2(1), 45–55.

Rahmatiani, L. (2020). Pendidikan kewarganegaraan sebagai pembentuk karakter bangsa. In *Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan* (pp. 87–94).

Samsuri. (2010). Pembentukan karakter warga negara demokratis dalam politik pendidikan Indonesia periode Orde Baru hingga era Reformasi. Makalah disampaikan dalam Diskusi MGMP PKn Kabupaten Sleman, 18 Oktober 2010.

Sukarno. (2015). *Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan*. Pustaka Pelajar.

Sunarso, dkk. (2002). *Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*. UNY Press.

Wibowo, A. (2012). *Pendidikan karakter*. Pustaka Pelajar.

Winataputra, U. S. (2012). *Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa: Gagasan, instrumentasi, dan praksis*. Widya Aksara Press.

Yuniarto, B. (2018). *Pendidikan demokrasi dan budaya demokrasi konstitusional*. Deepublish.